



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2003
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah telah melakukan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003;
 - b. bahwa hasil perhitungan Dana Alokasi Umum tersebut pada huruf a dan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 pada tanggal 21 November 2002, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH
PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003.

BAB I

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari :
 - a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Besarnya Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2003 ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) dari penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun Anggaran 2003 setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagikan kepada Daerah.
- (3) Besaran Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

BAB II

PERHITUNGAN DANA ALOKASI UMUM

Pasal 2

- (1) Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001.
- (2) Penghitungan Dana Alokasi Umum suatu Daerah juga mempertimbangkan Faktor Penyeimbang dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab Daerah.
- (3) Faktor Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas Alokasi Minimum kepada Daerah yang diperhitungkan dalam bentuk lumpsum dan berdasarkan proporsi beban belanja pegawai negeri sipil Daerah Tahun

Anggaran 2002.\

Pasal 3

- (1) Hasil perhitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan usulan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
- (2) Rincian Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Gubernur melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (2) Bupati/Walikota melaporkan penggunaan Dana Alokasi Umum setiap triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 1 TAHUN
 2003
 TANGGAL : 6 JANUARI
 2003

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM
 DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2003

NO.	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	DAU 2003 (miliar rupiah)
1.	Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	76,12
1.1	Kabupaten Aceh Barat	76,30
1.2	Kabupaten Aceh Besar	192,20
1.3	Kabupaten Aceh Selatan	114,25
1.4	Kabupaten Aceh Singkil	93,25
1.5	Kabupaten Aceh Tengah	149,68
1.6	Kabupaten Aceh Tenggara	89,10
1.7	Kabupaten Aceh Timur	139,03
1.8	Kabupaten Aceh Utara	149,12
1.9	Kabupaten Bireuen	153,95
1.10	Kabupaten Pidie	221,77
1.11	Kabupaten Simeuleu	79,66
1.12	Kabupaten Aceh Jaya	41,92
1.13	Kabupaten Nagan Raya	64,87
1.14	Kabupaten Aceh Barat Daya	47,56
1.15	Kabupaten Gayo Lues	58,93
1.16	Kabupaten Aceh Tamiang	52,52
1.17	Kota Banda Aceh	134,47
1.18	Kota Sabang	77,76
1.19	Kota Langsa	62,64
1.20	Kota Loksumawe	87,34
	Jumlah Se-Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	2.162,46
2.	Provinsi Sumatera Utara	301,75
2.1	Kabupaten Asahan	271,03
2.2	Kabupaten Dairi	151,43
2.3	Kabupaten Deli Serdang	470,67
2.4	Kabupaten Tanah Karo	173,46
2.5	Kabupaten Labuhan Batu	263,30
2.6	Kabupaten Langkat	269,48
2.7	Kabupaten Mandailing Natal	165,89
2.8	Kabupaten Nias	216,76
2.9	Kabupaten Simalungun	299,97
2.10	Kabupaten Tapanuli Selatan	243,62

2.11	Kabupaten Tapanuli Tengah	129,09
2.12	Kabupaten Tapanuli Utara	208,64
2.13	Kabupaten Toba Samosir	156,55
2.14	Kota Binjai	132,05
2.15	Kota Medan	396,67
2.16	Kota Pematang Siantar	135,73
2.17	Kota Sibolga	89,28
2.18	Kota Tanjung Balai	103,86
2.19	Kota Tebing Tinggi	106,36
2.20	Kota Padang Sidempuan	101,66
	Jumlah Se-Provinsi Sumatera Utara	4.387,24
3.	Provinsi Sumatera Barat	227,63
3.1	Kabupaten 50 Kota	160,47
3.2	Kabupaten Agam	186,69
3.3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	93,47
3.4	Kabupaten Padang Pariaman	171,87
3.5	Kabupaten Pasaman	203,42
3.6	Kabupaten Pesisir Selatan	185,37
3.7	Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung	159,88
3.8	Kabupaten Solok	194,37
3.9	Kabupaten Tanah Datar	168,66
3.10	Kota Bukit Tinggi	101,30
3.11	Kota Padang Panjang	81,13
3.12	Kota Padang	265,54
3.13	Kota Payakumbuh	119,97
3.14	Kota Sawahlunto	79,07
3.15	Kota Solok	88,36
3.16	Kota Pariaman	30,12
	Jumlah Se-Provinsi Sumatera Barat	2.517,33
4.	Provinsi Riau	74,21
4.1	Kabupaten Bengkalis	148,63
4.2	Kabupaten Indragiri Hilir	185,89
4.3	Kabupaten Indragiri Hulu	130,66
4.4	Kabupaten Kampar	147,42
4.5	Kabupaten Karimun	87,72
4.6	Kabupaten Riau. Kepulauan	89,10
4.7	Kabupaten Kuantan Singingi	114,52
4.8	Kabupaten Natuna	96,66
4.9	Kabupaten Pelalawan	91,46
4.10	Kabupaten Rokan Hilir	67,38
4.11	Kabupaten Rokan Hulu	93,89
4.12	Kabupaten Siak	67,06
4.13	Kota Batam	86,22
4.14	Kota Dumai	83,23
4.15	Kota Pekanbaru	161,80
4.16	Kota Tanjung Pinang	57,38

	Jumlah Se-Provinsi Riau	1.783,23
5.	Provinsi Jambi	209,25
5.1	Kabupaten Batanghari	140,88
5.2	Kabupaten Bungo	140,52
5.3	Kabupaten Kerinci	172,45
5.4	Kabupaten Merangin	147,64
5.5	Kabupaten Muaro Jambi	124,42
5.6	Kabupaten Sarolangun	128,63
5.7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	112,72
5.8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	104,91
5.9	Kabupaten Tebo	123,04
5.10	Kota Jambi	178,31
	Jumlah Se-Provinsi Jambi	1.582,76
6.	Provinsi Sumatera Selatan	231,93
6.1	Kabupaten Lahat	186,92
6.2	Kabupaten Musi Banyuasin	136,10
6.3	Kabupaten Musi Rawas	181,95
6.4	Kabupaten Muara Enim	177,27
6.5	Kabupaten Ogan Kemiling Ilir	303,05
6.6	Kabupaten Ogan Kemiling Ulu	314,04
6.7	Kabupaten Banyuasin	104,58
6.8	Kota Palembang	342,66
6.9	Kota Prabumulih	68,02
6.10	Kota Pagar Alam	85,81
6.11	Kota Lubuk Linggau	87,02
	Jumlah Se-Provinsi Sumatera Selatan	2.219,35
7.	Provinsi Bangka Belitung	162,49
7.1	Kabupaten Bangka	181,39
7.2	Kabupaten Belitung	116,72
7.3	Kota Pangkal Pinang	90,85
	Jumlah Se-Provinsi Bangka Belitung	551,44
8.	Provinsi Bengkulu	208,84
8.1	Kabupaten Bengkulu Selatan	205,26
8.2	Kabupaten Bengkulu Utara	213,23
8.3	Kabupaten Rejang Lebong	194,20
8.4	Kota Bengkulu	152,27
	Jumlah Se-Provinsi Bengkulu	973,80
9.	Provinsi Lampung	252,78
9.1	Kabupaten Lampung Barat	144,69
9.2	Kabupaten Lampung Selatan	298,17
9.3	Kabupaten Lampung Tengah	296,05
9.4	Kabupaten Lampung Utara	215,61
9.5	Kabupaten Lampung Timur	241,02

9.6	Kabupaten Tanggamus	252,63
9.7	Kabupaten Tulang Bawang	195,91
9.8	Kabupaten Way Kanan	129,60
9.9	Kota Bandar Lampung	233,55
9.10	Kota Metro	116,05
	Jumlah Se-Provinsi Lampung	2.376,06
10.	Provinsi DKI Jakarta	734,89
11.	Provinsi Jawa Barat	429,57
11.1	Kabupaten Bandung	726,24
11.2	Kabupaten Bekasi	231,24
11.3	Kabupaten Bogor	517,07
11.4	Kabupaten Ciamis	438,20
11.5	Kabupaten Cianjur	389,85
11.6	Kabupaten Cirebon	384,66
11.7	Kabupaten Garut	468,17
11.8	Kabupaten Indramayu	320,80
11.9	Kabupaten Karawang	327,96
11.10	Kabupaten Kuningan	282,60
11.11	Kabupaten Majalengka	295,27
11.12	Kabupaten Purwakarta	188,57
11.13	Kabupaten Subang	307,32
11.14	Kabupaten Sukabumi	394,89
11.15	Kabupaten Sumedang	291,22
11.16	Kabupaten Tasikmalaya	375,63
11.17	Kota Bandung	416,68
11.18	Kota Bekasi	256,49
11.19	Kota Bogor	197,42
11.20	Kota Cirebon	138,02
11.21	Kota Depok	209,55
11.22	Kota Sukabumi	124,63
11.23	Kota Tasikmalaya	189,17
11.24	Kota Cimahi	131,89
	Jumlah Se-Provinsi Jawa Barat	8.033,11
12.	Provinsi Banten	171,86
12.1	Kabupaten Lebak	247,27
12.2	Kabupaten Pandeglang	268,90
12.3	Kabupaten Serang	327,76
12.4	Kabupaten Tangerang	367,01
12.5	Kota Cilegon	94,11
12.6	Kota Tangerang	186,10
	Jumlah Se-Provinsi Banten	1.663,00
13.	Provinsi Jawa Tengah	509,87
13.1	Kabupaten Banjarnegara	248,82
13.2	Kabupaten Banyumas	353,88

13.3	Kabupaten Batang	205,69
13.4	Kabupaten Blora	270,14
13.5	Kabupaten Boyolali	292,07
13.6	Kabupaten Brebes	357,38
13.7	Kabupaten Cilacap	368,27
13.8	Kabupaten Demak	245,94
13.9	Kabupaten Grobogan	315,97
13.10	Kabupaten Jepara	248,66
13.11	Kabupaten Karanganyar	266,55
13.12	Kabupaten Kebumen	315,40
13.13	Kabupaten Kendal	270,56
13.14	Kabupaten Klaten	374,12
13.15	Kabupaten Kudus	212,68
13.16	Kabupaten Magelang	280,25
13.17	Kabupaten Pati	300,90
13.18	Kabupaten Pekalongan	222,58
13.19	Kabupaten Pemalang	297,36
13.20	Kabupaten Purbalingga	236,80
13.21	Kabupaten Purworejo	269,17
13.22	Kabupaten Rembang	188,93
13.23	Kabupaten Semarang	255,84
13.24	Kabupaten Sragen	271,94
13.25	Kabupaten Sukoharjo	253,71
13.26	Kabupaten Tegal	309,63
13.27	Kabupaten Temanggung	221,66
13.28	Kabupaten Wonogiri	311,09
13.29	Kabupaten Wonosobo	220,99
13.30	Kota Magelang	119,98
13.31	Kota Pekalongan	122,17
13.32	Kota Salatiga	105,69
13.33	Kota Semarang	308,71
13.34	Kota Surakarta	215,28
13.35	Kota Tegal	151,65
	Jumlah Se-Provinsi Jawa Tengah	9.520,32
14.	Provinsi DI Yogyakarta	201,96
14.1	Kabupaten Bantul	292,70
14.2	Kabupaten Gunung Kidul	251,34
14.3	Kabupaten Kulon Progo	215,47
14.4	Kabupaten Sleman	304,78
14.5	Kota Yogyakarta	196,10
	Jumlah Se-Provinsi DI Yogyakarta	1.462,36
15.	Provinsi Jawa Timur	414,32
15.1	Kabupaten Bangkalan	236,14
15.2	Kabupaten Banyuwangi	356,26
15.3	Kabupaten Blitar	293,16
15.4	Kabupaten Bojonegoro	292,25
15.5	Kabupaten Bondowoso	234,02

15.6	Kabupaten Gresik	235,13
15.7	Kabupaten Jember	456,80
15.8	Kabupaten Jombang	280,87
15.9	Kabupaten Kediri	347,73
15.10	Kabupaten Lamongan	296,74
15.11	Kabupaten Lumajang	256,50
15.12	Kabupaten Madiun	223,03
15.13	Kabupaten Magetan	242,98
15.14	Kabupaten Malang	464,36
15.15	Kabupaten Mojokerto	250,38
15.16	Kabupaten Nganjuk	290,90
15.17	Kabupaten Ngawi	262,49
15.18	Kabupaten Pacitan	204,94
15.19	Kabupaten Pamekasan	220,13
15.20	Kabupaten Pasuruan	343,13
15.21	Kabupaten Ponorogo	268,35
15.22	Kabupaten Probolinggo	254,50
15.23	Kabupaten Sampang	202,35
15.24	Kabupaten Sidoarjo	330,93
15.25	Kabupaten Situbondo	203,56
15.26	Kabupaten Sumenep	312,23
15.27	Kabupaten Trenggalek	247,66
15.28	Kabupaten Tuban	269,14
15.29	Kabupaten Tulungagung	300,15
15.30	Kota Blitar	111,77
15.31	Kota Kediri	118,74
15.32	Kota Madiun	168,29
15.33	Kota Malang	204,79
15.34	Kota Mojokerto	109,54
15.35	Kota Pasuruan	120,82
15.36	Kota Probolinggo	108,51
15.37	Kota Surabaya	331,57
15.38	Kota Batu	87,42
	Jumlah Se-Provinsi Jawa Timur	9.952,63
16.	Provinsi Kalimantan Barat	272,91
16.1	Kabupaten Bengkayang	117,11
16.2	Kabupaten Landak	148,85
16.3	Kabupaten Kapuas Hulu	187,95
16.4	Kabupaten Ketapang	238,94
16.5	Kabupaten Pontianak	237,65
16.6	Kabupaten Sambas	201,81
16.7	Kabupaten Sanggau	231,61
16.8	Kabupaten Sintang	243,52
16.9	Kota Pontianak	174,78
16.10	Kota Singkawang	110,33
	Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Barat	2.165,46
17.	Provinsi Kalimantan Tengah	253,60

17.1	Kabupaten Barito Selatan	102,55
17.2	Kabupaten Barito Utara	102,36
17.3	Kabupaten Kapuas	171,53
17.4	Kabupaten Kotawaringin Barat	106,91
17.5	Kabupaten Kotawaringin Timur	147,18
17.6	Kabupaten Barito Timur	61,91
17.7	Kabupaten Murung Raya	88,20
17.8	Kabupaten Gunung Mas	66,79
17.9	Kabupaten Pulang Pisau	74,02
17.10	Kabupaten Sukamara	29,91
17.11	Kabupaten Lamandau	36,88
17.12	Kabupaten Katingan	86,46
17.13	Kabupaten Seruyan	72,37
17.14	Kota Palangka Raya	142,00
	Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Tengah	1.542,67
18.	Provinsi Kalimantan Selatan	201,09
18.1	Kabupaten Banjar	167,32
18.2	Kabupaten Barito Kuala	133,03
18.3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	137,66
18.4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	139,26
18.5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	134,79
18.6	Kabupaten Kota Baru	162,35
18.7	Kabupaten Tabalong	113,74
18.8	Kabupaten Tanah Laut	110,59
18.9	Kabupaten Tapin	116,13
18.10	Kota Banjar Baru	97,85
18.11	Kota Banjarmasin	190,30
	Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Selatan	1.704,12
19.	Provinsi Kalimantan Timur	76,41
19.1	Kabupaten Berau	97,32
19.2	Kabupaten Bulungan	116,56
19.3	Kabupaten Kutai	227,53
19.4	Kabupaten Kutai Barat	95,71
19.5	Kabupaten Kutai Timur	68,97
19.6	Kabupaten Malinau	92,36
19.7	Kabupaten Nunukan	60,45
19.8	Kabupaten Paser	73,53
19.9	Kabupaten Penajam Paser Utara	31,97
19.10	Kota Balikpapan	103,24
19.11	Kota Bontang	50,03
19.12	Kota Samarinda	152,61
19.13	Kota Tarakan	52,14
	Jumlah Se-Provinsi Kalimantan Timur	1.298,82
20.	Provinsi Sulawesi Utara	206,65

20.1	Kabupaten Bolaang Mangondow	213,62
20.2	Kabupaten Minahasa	361,34
20.3	Kabupaten Sangihe Talaud	113,48
20.4	Kabupaten Kepulauan Talaud	54,28
20.5	Kota Bitung	114,15
20.6	Kota Manado	177,38
	Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Utara	1.240,91
21.	Provinsi Gorontalo	177,13
21.1	Kabupaten Boalemo	124,58
21.2	Kabupaten Gorontalo	229,43
21.3	Kota Gorontalo	133,02
	Jumlah Se-Provinsi Gorontalo	664,17
22.	Provinsi Sulawesi Tengah	240,70
22.1	Kabupaten Banggai	176,73
22.2	Kabupaten Banggai Kepulauan	118,04
22.3	Kabupaten Buol	104,59
22.4	Kabupaten Toli-Toli	129,65
22.5	Kabupaten Donggala	184,56
22.6	Kabupaten Morowali	143,05
22.7	Kabupaten Poso	201,95
22.8	Kabupaten Parigi Moutong	112,04
22.9	Kota Palu	163,70
	Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tengah	1.575,01
23.	Provinsi Sulawesi Selatan	299,05
23.1	Kabupaten Bantaeng	106,33
23.2	Kabupaten Barru	120,81
23.3	Kabupaten Bone	256,48
23.4	Kabupaten Bulukumba	172,00
23.5	Kabupaten Enrekang	124,25
23.6	Kabupaten Gowa	202,11
23.7	Kabupaten Jeneponto	141,78
23.8	Kabupaten Luwu	141,54
23.9	Kabupaten Luwu Utara	175,21
23.10	Kabupaten Majene	115,67
23.11	Kabupaten Mamuju	160,84
23.12	Kabupaten Maros	147,55
23.13	Kabupaten Pangkep	151,26
23.14	Kabupaten Pinrang	152,08
23.15	Kabupaten Polewali Mamasa	124,14
23.16	Kabupaten Selayar	105,30
23.17	Kabupaten Sidrap	147,83
23.18	Kabupaten Sinjai	132,82
23.19	Kabupaten Soppeng	147,03
23.20	Kabupaten Takalar	136,89

23.21	Kabupaten Tana Toraja	196,79
23.22	Kabupaten Wajo	166,13
23.23	Kabupaten Mamasa	69,01
23.24	Kota Pare-Pare	116,32
23.25	Kota Makasar	308,14
23.26	Kota Palopo	45,59
	Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Selatan	4.162,96
24.	Provinsi Sulawesi Tenggara	226,43
24.1	Kabupaten Buton	215,78
24.2	Kabupaten Kendari	258,23
24.3	Kabupaten Kolaka	179,85
24.4	Kabupaten Muna	186,90
24.5	Kota Kendari	140,33
24.6	Kota Bau-Bau	103,97
	Jumlah Se-Provinsi Sulawesi Tenggara	1.311,49
25.	Provinsi Bali	184,87
25.1	Kabupaten Badung	147,38
25.2	Kabupaten Bangli	122,39
25.3	Kabupaten Buleleng	237,61
25.4	Kabupaten Gianyar	189,20
25.5	Kabupaten Jembrana	137,83
25.6	Kabupaten Karangasem	163,26
25.7	Kabupaten Klungkung	120,62
25.8	Kabupaten Tabanan	203,70
25.9	Kota Denpasar	176,99
	Jumlah Se-Provinsi Bali	1.683,85
26.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	223,95
26.1	Kabupaten Bima	164,65
26.2	Kabupaten Dompu	123,73
26.3	Kabupaten Lombok Barat	219,53
26.4	Kabupaten Lombok Tengah	238,96
26.5	Kabupaten Lombok Timur	278,32
26.6	Kabupaten Sumbawa	182,53
26.7	Kota Mataram	146,07
26.8	Kota Bima	59,70
	Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.637,46
27.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	283,04
27.1	Kabupaten Alor	153,70
27.2	Kabupaten Belu	180,52
27.3	Kabupaten Ende	160,66
27.4	Kabupaten Flores Timur	146,69
27.5	Kabupaten Kupang	189,11
27.6	Kabupaten Lembata	111,55

27.7	Kabupaten Manggarai	233,48
27.8	Kabupaten Ngada	156,62
27.9	Kabupaten Sikka	146,48
27.10	Kabupaten Sumba Barat	174,02
27.11	Kabupaten Sumba Timur	155,44
27.12	Kabupaten Timor Tengah Selatan	203,03
27.13	Kabupaten Timor Tengah Utara	149,78
27.14	Kabupaten Rote-Ndao	39,85
27.15	Kota Kupang	148,44
	Jumlah Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.632,42
28.	Provinsi Maluku	248,37
28.1	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	161,61
28.2	Kabupaten Maluku Tengah	277,68
28.3	Kabupaten Maluku Tenggara	165,06
28.4	Kabupaten Pulau Buru	126,70
28.5	Kota Ambon	170,52
	Jumlah Se-Provinsi Maluku	1.149,93
29.	Provinsi Maluku Utara	200,96
29.1	Kabupaten Halmahera Tengah	159,92
29.2	Kabupaten Maluku Utara	250,35
29.3	Kota Ternate	121,41
	Jumlah Se-Provinsi Maluku Utara	732,64
30.	Provinsi Papua	395,16
30.1	Kabupaten Biak Numfor	171,60
30.2	Kabupaten Fak-Fak	202,75
30.3	Kabupaten Jayapura	307,52
30.4	Kabupaten Jayawijaya	335,91
30.5	Kabupaten Manokwari	247,19
30.6	Kabupaten Merauke	456,76
30.7	Kabupaten Mimika	143,76
30.8	Kabupaten Nabire	207,28
30.9	Kabupaten Paniai	189,96
30.10	Kabupaten Puncak Jaya	173,62
30.11	Kabupaten Sorong	232,51
30.12	Kabupaten Yapen Waropen	192,44
30.13	Kota Jayapura	160,07
30.14	Kota Sorong	139,57
	Jumlah Se-Provinsi Papua	3.556,10
	JUMLAH SELURUH INDONESIA	76.978,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands